

PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN MADRASAH

Sori Alam Harahap¹

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Rokan Hilir¹

Email: harahapsorialam@gmail.com

Received: 29 November 2022; Accepted 15 Desember 2022; Published 15 Januari 2023

Ed 2022; 3(2): 215-220

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pentingnya mengelola keuangan pada pendidikan di madrasah khususnya agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan madrasah masih menjadi terasing di era otonomi sekarang. Diantaranya akibat adalah pembiayaan pendidikan di madrasah tidak diperhitungkan oleh pemerintah daerah, karena dianggap telah mendapatkan dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Memperoleh data dari berbagai sumber-sumber ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari data yang berkenaan dengan pembahasan pada penelitian yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data-data yang relevan. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu peraturan tentang teknik pengelolaan pendidikan madrasah sudah diterbitkan oleh pemerintah, pengelolaan biaya pendidikan madrasah masih mengedepankan sekolah umum dibandingkan madrasah dari segi anggaran, dan sumber-sumber pembiayaan pendidikan madrasah bisa didapat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana kerjasama dengan perusahaan swasta, iuran orangtua dan kegiatan pameran yang diselenggarakan.

Kata kunci: Pengelolaan, Biaya Pendidikan

MANAGEMENT OF SCHOOL EDUCATION COSTS

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of managing finances in education in school, especially in order to create an effective and efficient learning process. This is because the school are still alienated in the current era of autonomy. One of the consequences is that the funding for education in the school is not taken into account by the district and city governments, because they are considered to have received funds from the central government through the provincial and district Kamenag channels. This type of research uses library research. Obtain data from various relevant scientific sources. The data collection technique used is literature study, namely by searching for data relating to the discussion of the research under study. This study uses relevant data. The results obtained in this study are that regulations regarding management techniques for school education have been issued by the government, the management of school education costs still prioritizes public schools compared to madrasahs in terms of budget, and sources of funding for school education can be obtained from the central government, local governments in collaboration with companies private sector, parent products and organized exhibition activities.

Keywords: Management, Education Costs

Copyright © 2022, Journal of Education and Teaching

PENDAHULUAN

Biaya dalam pengertian di sini memiliki cakupan yang luas. Yakni semua jenis yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik berbentuk uang maupun barang dan tenaga yang dapat dianggarkan dengan uang. Dalam pengertian ini misalnya iuran siswa, sarana fisik, buku-buku, guru, tenaga kependidikan dan lain sebagainya yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan biaya. Bagaimana biaya-biaya direncanakan, diperoleh, dialokasikan dan dikelola merupakan persoalan pembiayaan atau pendanaan pendidikan (*educational finance*). Pelaksanaan pembiayaan ini agar terencana dengan baik maka dapat dilakukan dengan cara manajemen pembiayaan pendidikan terutama di lembaga pendidikan madrasah (Mulyasa, 2005) dalam (Masdito, 2017). Pendanaan biaya pendidikan harus terorganisir secara baik dan tepat sasaran. Hal ini sangat jelas tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 48 disebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pada tingkat satuan pendidikan termasuk madrasah, biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, iuran siswa dan sumbangan masyarakat serta bantuan-bantuan lain. Pembiayaan ini ditingkat sekolah atau madrasah hendaknya tercatat dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau madrasah (RAPBS/RAPBM). Bagi sekolah atau madrasah negeri sebagian besar biaya pendidikan berasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Sedangkan pada sekolah atau madrasah swasta berasal dari orangtua siswa dan dari bantuan penyelenggaraannya atau yayasan serta bantuan lainnya.

Mengenai biaya pendidikan madrasah, perlu pengkajian yang komprehensif, sebab setiap madrasah mempunyai kebutuhan masing-masing berbeda. Tetapi perlu adanya ketetapan yang ideal tentang biaya pendidikan bagi setiap madrasah dan perlu adanya teknik pengelolaannya.

Pada era otonomi sekarang ini, pengelolaan anggaran biaya pendidikan baik Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) masih terpusat di bawah pembinaan Kementerian Agama dengan alasan bahwa urusan agama tidak termasuk yang didesentralisasikan. Alasan ini menurut Dedi Supriadi perlu dikaji ulang karena tampaknya maksud awal dari urusan agama tentang pembinaan kehidupan beragama dan kemungkinan tidak meliputi pendidikan yang dibinanya. Tapi pada kenyataannya madrasah tetap dikelola secara terpusat, sementara sekolah lainnya telah didesentralisasikan pengelolaannya. Dengan demikian madrasah masih menjadi terasing di era otonomi sekarang. Akibatnya adalah pembiayaan pendidikan di madrasah tidak diperhitungkan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, karena dianggap telah mendapatkan dana dari pemerintah pusat melalui jalur Kementerian Agama di provinsi maupun kabupaten/kota.

Kajian mengenai biaya pendidikan pada satuan pendidikan disesuaikan dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Biaya Satuan Pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, guna menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masalah pembiayaan pendidikan dalam hal ini pendidikan madrasah merupakan masalah kompleks yang memerlukan teknik pengelolaan biaya pendidikan. Mempertimbangkan kondisi masing-masing madrasah berbeda-beda sehingga diperlukan acuan dalam pengelolaan biaya pendidikannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu penelitian yang memuat teori-teori yang relevan terhadap permasalahan pada penelitian. Di samping itu kajian pustaka ini atau studi pustaka merupakan serangkaian bentuk dari langkah kegiatan penelitian yang harus dilakukan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa penelitian kepustakaan adalah

kajian berdasarkan teori, referensi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Penelitian ini berdasarkan atas kajian teoritis atau studi relevan dari penelitian sebelumnya. Jadi, penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan sumber-sumber referensi maupun hasil penelitian terdahulu, seperti buku dan jurnal ilmiah.

Teknik pengumpulan data menurut (Bahri, 2021) adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari data yang berkenaan dengan pembahasan pada penelitian yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data-data yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah

Manajemen pembiayaan merupakan proses untuk mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana yang menunjang proses pembelajaran agar menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan, minimalnya terdapat tiga hal yang penting diperhatikan diantaranya, proses penggalan dana (*funding*), sumber dana, dan alokasi pembelanjaan dana (Fattah, 2017). Oleh sebab itu, fokus manajemen pembiayaan pendidikan memuat bagaimana sumber dana yang tersedia mampu dikelola secara profesional sehingga menyalurkan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan (Syarbini, 2013). Menjalankan fungsi manajemen pembiayaan secara efektif, maka sekolah harus memperhatikan prinsip-prinsip manajemen pada pembiayaan pendidikan sebagai berikut: 1) akuntabilitas (*accountability*) 2) transparan, 3) integritas, 4) konsistensi, 5) efektif dan efisien (Bairizki, 2021).

Perencanaan dalam manajemen keuangan merupakan kegiatan terkait pada perencanaan sumber dana dengan tujuan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan mencapai sasaran tujuan dari pendidikan madrasah (Mujayaroh & Rohmat 2020).

Biaya pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah. Orangtua maupun siswa sendiri sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Paling tidak ada tiga persoalan pokok dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu: (1) *financing*, menyangkut dari mana sumber pembiayaan diperoleh, (2) *budgeting*, bagaimana dana pendidikan dialokasikan, (3) *accountability*, bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan. Pembiayaan madrasah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan terutama tingkat menengah. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan, serta pengawasan penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan.

2. Alternatif Sumber-sumber pembiayaan pendidikan madrasah

Jika dari sumber biaya pendidikan madrasah, maka biaya yang diperoleh oleh madrasah terbagi menjadi tiga bagian yaitu : (1) dana dari pemerintah, yang umumnya terdiri dari dana-dana rutin, meliputi gaji serta biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas, (2) dana dari masyarakat, yang sekarang melalui komite sekolah, ada yang digali dari orangtua siswa maupun sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha, dan bahkan ada beberapa sekolah yang mampu membangun *networking* sehingga mendapatkan pembiayaan pendidikan yang cukup besar.

3. Penyusunan Anggaran dan Penggunaan Sumber Dana

Sebelum anggaran berjalan kepala madrasah baik negeri maupun swasta harus menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) dalam jangka waktu setahun ke depan masing-masing madrasah. Rencana anggaran madrasah disusun oleh kepala madrasah bekerjasama dengan para guru, staf dan komite madrasah.

Perkiraan pendapatan menyangkut jumlah dana yang akan diperoleh sekolah atau madrasah dalam waktu tertentu. Ketersediaan dana itu tergantung pada informasi di tiga tingkatan: pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai contoh, jika madrasah ingin membangun ruang laboratorium dan ruang musholla maka harus dialokasikan sejumlah dana untuk membangun kedua ruangan tersebut. Demikian halnya dengan biaya pemakaian listrik, harga satuannya naik misalnya 20% untuk tahun depan. Melalui RAPBM dapat dijelaskan berapa biaya yang diperlukan agar kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dan bagaimana sumber-sumber dana itu tersedia bagi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut. RAPBM dapat disusun untuk jangka pendek yaitu tahunan seperti contoh di atas, jangka menengah 3-5 tahun dan jangka panjang lebih dari 5 tahun.

4. Alokasi Anggaran Pendidikan Madrasah

Perhitungan biaya dalam pendidikan akan ditentukan oleh madrasah tersebut yang didasarkan pula pada perhitungan biaya nyata sesuai dengan kegiatan menurut jenis dan volumenya. Biaya satuan per siswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke madrasah secara efektif untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan. Oleh karena biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah siswa pada masing-masing madrasah, maka ukuran biaya satuan dianggap standar dan dapat dibandingkan antara madrasah satu dengan madrasah lainnya. Analisis mengenai biaya satuan dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dapat dilakukan dengan menggunakan madrasah sebagai unit analisis. Dengan menganalisis biaya satuan, memungkinkan untuk mengetahui efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber pembiayaan di madrasah. Di samping itu juga dapat menilai bagaimana alternatif kebijakan dalam upaya perbaikan atau peningkatan sistem pendidikan.

Di dalam terminologi administrasi keuangan, khususnya administrasi keuangan bidang pendidikan dibedakan antara biaya (*cost*) dan pembelajaran (*expenditure*). Biaya (*cost*) adalah nilai besar adalah nilai besar dana yang diperkirakan perlu disediakan untuk membiayai kegiatan tertentu, misalnya kegiatan akademik, kegiatan kesiswaan dan sebagainya. Sedangkan pembelajaran (*expenditure*) adalah besar dana nyata yang dikeluarkan untuk membiayai unit kegiatan tertentu, misalnya kegiatan praktikum siswa. Oleh karena itu, seringkali muncul adanya perbedaan antara biaya yang dianggarkan dengan pembelajaran nyata.

Kemudian secara umum, pembiayaan pendidikan dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu : (1) biaya rutin (*recurring cost*), intinya mencakup keseluruhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan seperti biaya administrasi, pemeliharaan fasilitas, pengawasan, gaji, biaya untuk kesejahteraan dan biaya modal (*capital cost*), merupakan biaya pembangunan mencakup biaya untuk pembangunan fisik, pembelian tanah dan pengadaan barang-barang lainnya yang didanai melalui anggaran pembangunan.

5. Perhitungan Biaya Operasional

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Sementara itu, menurut Ayat (4) Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 biaya operasi madrasah meliputi biaya berikut :

- a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
- Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lainnya.

6. Akuntabilitas Biaya Pendidikan Madrasah

Pelaporan merupakan bagian dari proses monitoring dan evaluasi praktek manajemen keuangan. Pelaporan bermaksud memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kegiatan yang telah direalisasikan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Seringkali laporan keuangan yang diminta bervariasi, misalnya menurut jangka waktu pelaporan, berjenjang (*hierarkhis*), berdasarkan jenis proyek, atau berdasarkan sumber dana yang dikeluarkan.

Laporan keuangan terpadu sifatnya mengkonsolidasikan seluruh pemasukan dan pengeluaran uang untuk keperluan sekolah atau madrasah baik strategi atau investasi maupun operasional. Laporan ini mencakup pemasukan dari pemerintah daerah (provinsi dan atau kabupaten/kota), pemerintah pusat, baik rutin ataupun proyek, dari orangtua/masyarakat atau dari penghasilan lainnya termasuk sumbangan tenaga atau bahan material lainnya. Besarnya gaji pegawai sebaiknya dimasukkan sebagai unsur penerimaan ataupun pengeluaran keuangan madrasah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut peneliti paparkan sebelumnya dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut : pertama, peraturan-peraturan tentang teknik pengelolaan pendidikan madrasah sudah diterbitkan oleh pemerintah sebagai dasar dan pedoman bagi penyelenggara madrasah untuk menjalankan fungsinya, namun hingga sekarang apa yang diamanatkan oleh peraturan tentang hal tersebut belumlah teraplikasikan secara maksimal. Kedua, pengelolaan biaya pendidikan madrasah masih lebih memanjakan sekolah umum dibandingkan madrasah dari segi anggaran. Ketiga, sumber-sumber pembiayaan pendidikan madrasah bisa didapat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana kerjasama dengan perusahaan swasta, iuran orangtua siswa, dari hasil kegiatan bazar dan pameran yang diselenggarakan oleh madrasah dan lain-lainnya. Adapun pemanfaatan pengalokasian anggaran tersebut tentu dikeluarkan oleh madrasah sesuai dengan proporsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Duhou, Ibtisam. (2016). *School based manajement*. Paris. UNESCO. International Institute for Educational Planning.
- British Council and The Asian Devolopment Bank. (2013). *Capacity Building for Social Service Delivery*. Materi Pelatihan Kabupaten/Kota. Jakarta. Prima Center.
- Bairizki, A. (2021). *Manajemen Perubahan*. Bandung: Widiana Bhakti Persada.
- Depag, RI. (2005). Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta. Dirjen Binbaga
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Indra Djati Sidi. (2016). *Menghilangkan Disparitas (Kesenjangan) Alokasi Anggaran Untuk Sekolah Umum Dan Madrasah*.
- Fakhrudin, Fuad. (2017). Madrasah Dan Otonomi Daerah. *Jurnal Madrasah* 3(1).
- Fattah, N. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mighat, A Dan Tan JP. (2018). *Analytical Tools For Sector Work In Education*. Work Bank Publication
- Masditou. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu. *Jurnal Ansiru PAI*. 1(2).
- Mujayaroh., & Rohmat. (2020). *Pengelollan dan Pengalokasian Dana Pendidikan Di Lembaga Pendidikan*. Afannur: Journal of Islamic Education. 1(1).

Nanang, Fattah. (2014). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya
Syarbini. (2013). *Manajemen Madrasah Teori, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.